

PROFESIONALITAS APARATUR BIROKRASI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

Nawab Kursaid

nawab@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at getting the deep understanding and answer of the facts toward problems related to the professionalism of bureaucrat staffs of West Palu Sub-district. This was a qualitative research. The informants of this research were the chief of West Palu Sub-district, Secretary of West Palu Sub-district, the section head of the sub-district, and public user of the service. The informants were determined by using purposive sampling technique. Data were collected through observation, interview, and documentation. The technique of data analysis was done through data reduction, data display, and conclusion or verification. The conclusion was obtained from some of the whole configurative activities. The conclusion was also verified during the research. In order to analyze the data, the researcher adopted the Siagian's theory with the indicators: creativity, innovation, and responsiveness. The research result showed that the professionalism of bureaucrat staffs of West Palu Sub-district, Palu City, was not optimal yet in administering their jobs and functions, because all indicators analyzed did not have yet good result. In addition, some of the public participation improvement programs were not done, because of the limited budget and of the insufficient infrastructures to support the administration of their jobs and functions. The responses of bureaucrat staffs toward public claims were not done yet well.

Keywords: Professionalism, creativity, innovation, and responsiveness

Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan birokrasi yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan, mengingat secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tupoksinya dan tingkatannya masing-masing. Salah satu

harapan masyarakat, selaku konsumen pelayanan adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata yang hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrasi pemerintah yang senantiasa menyesuaikan pelayanannya.

Pada hal para aparatur seharusnya bekerja berdasarkan aturan kebiasaan yang berlaku yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah dijabarkan dalam uraian tugas masing-masing di dalam seksi dan staf yang ada di dalamnya. Apabila menghadapi kasus yang belum pernah dijumpai, maka dia akan berkonsultasi terlebih dulu atau melimpahkan kepada atasan, meskipun terkadang merupakan masalah sepele, misalnya kelengkapan berkas administrasi pelayanan. Demikian juga dengan pejabat tingkat menengah (eselon IV) belum berani untuk mengemukakan ide-ide baru terkait dengan perkembangan organisasi dan

pemberian layanan bagi masyarakat, dengan alasan merepotkan diri sendiri atau takut apabila dianggap berlawanan dengan atasan yang dapat berpengaruh pada kedudukannya. Identifikasi masalah tersebut diatas dapat diuraikan, bahwa sikap aparatur pemerintah di Kecamatan Palu Barat yang masih kurang adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Aparatur yang masih mengabaikan pentingnya pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari, dan Kurangnya dukungan pimpinan dan kesadaran aparatur pemerintah dalam pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur birokrasi di Kecamatan Palu Barat.

METODE

Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 1998:3) dinyatakan bahwa "penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan". Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan nara sumber (*key informant*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjaringan informasi akan diakhiri.

2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya

3. Observasi (pengamatan lapangan)

Yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

Penelitian ini hanya sampai pada penemuan/identifikasi konsep konsep, belum sampai pada tataran pembentukan teori, karena berbagai keterbatasan dari penulis, menyangkut biaya untuk kegiatan penelitian dan waktu penelitian yang relatif singkat untuk mengungkap sebuah fenomena dalam kajian kualitatif.

Teknik analisis data penelitian ini, penulis menggunakan pandangan fenomenologis, yaitu berusaha memahami arti suatu peristiwa dalam kaitanya dengan pengalaman subyektif dari seseorang dalam memaknai suatu persoalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Palu Barat dengan masyarakat yang berbasis agamais yang menjadi tolak ukur tersendiri dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Palu. Sehingga sangat diperlukan perencanaan secara strategis, serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan dan strategis Kecamatan maka diperlukan sumber daya manusia Kecamatan yang demokrasi, kreatif, profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi proyeksi yang diinginkan kedepan melalui visi kecamatan Palu Barat yaitu “ maka disusulah Renstra Kecamatan Palu Barat yang merupakan salah satu bentuk nyata yang telah dilaksanakan adalah menyusun rencana strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Palu Barat dalam kurung waktu 2011 – 2015. Tindak lanjut dari Renstra tersebut maka disusun rencana kerja kinerja kecamatan. Rencana kerja kecamatan yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong masyarakat dan swasta. Penyusunan dokumen Renja Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja Kecamatan yang dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup, (1). Tahap perumusan rancangan renja kecamatan dan, (2). Tahapan penyajian rencana renja kecamatan.

Aspek yang di bahas dalam penelitian ini adalah profesionalitas aparatur birokrasi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan referensi teori dari Siagian (2000) dalam bukunya administrasi pembangunan.

Dalam pembahasan penulis berupaya menguraikan secara rinci hasil penelitian, dengan menguraikan teori profesionalitas hal ini dimaksudkan agar pembahasan mendapatkan penguatan secara ilmiah.

Untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tidak terlepas dari peran aparatur yang bekerja secara professional dalam organisasi pemerintah.

Hal tersebut dapat terlaksana apabila organisasi dapat mengetahui sejauh mana profesionalitas aparatur birokrasi yang dilihat dari indikator; Kreatifitas (*creativity*), Inovasi (*innovasi*), Responsifitas (*responsivity*). Siagian (2000)

Terselenggaranya *good governance* adalah merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dari uraian tugas pokok yang harus dijalankan oleh aparatur birokrasi Kecamatan Palu Barat Kota Palu seperti yang di katakan di atas, maka sasaran utama yang ingin di capai ialah pengambilan kebijakan dan implementasi yang tepat, terwujudnya bimbingan serta evaluasi secara menyeluruh pada penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini tentunya dapat di capai dengan adanya roda penggerak organisasi yaitu aparatur birokrasi yang profesionalitas dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban. Sehingga secara umum kinerja yang dihasilkan berorientasi tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh.

Kreatifitas

Salah satu ukuran bagi aparat professional baik secara individu, tim atau organisasi terletak pada kreatifitas kerjanya, bilamana kreatifitas tinggi, maka professional individu, tim atau organisasi tersebut dikatakan baik dan berhasil. Sebaliknya apabila kreatifitas rendah atau menurun maka professional dikatakan kurang baik atau kurang berhasil.

Sebelum mendefinisikan apa arti kreativitas, terlebih dahulu kita harus tahu kata dasar kreativitas yaitu berasal dari kata "kreatif" yang berarti mempunyai kemampuan untuk mencipta. Untuk memahami arti istilah kreativitas seperti yang digunakan para psikolog, pengkajian pengertian istilah ini terdapat banyak arti kreativitas yang terpopuler, di antaranya yang sering digunakan oleh para psikolog adalah sebagai berikut :1). Salah satu arti kreativitas yang paling populer menekankan pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda. Kebanyakan orang menganggap bahwa kreativitas dapat dinilai melalui hasil atau apa saja yang diciptakan seseorang, akan tetapi kreativitas tidak selalu membuat hasil yang dapat diamati dan dinilai.2). Konsep kreativitas yang kedua yang populer menyatakan bahwa apa saja yang diciptakan selalu baru dan

berbeda dari yang telah ada dan karenanya unik. Terdapat banyak bukti bahwa konsep ini tidak benar atau hanya benar sebagian. Diakui bahwa semua kreativitas mencakup gabungan dari gagasan atau produk lama merupakan dasar bagi yang baru.3). Gagasan yang keempat dari kreativitas adalah ia merupakan proses mental yang unik, sesuatu yang semat-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinal. 4) Kreativitas dianggap sinonim dengan kecerdasan yang tinggi. Keyakinan ini telah diperkuat dengan kenyataan bahwa dengan IQ yang sangat tinggi disebut jenius, istilah yang oleh orang awam disamakan dengan kreativitas. .5) Kreativitas yaitu sepercik kejeniusan yang diwariskan pada seseorang dan tidak ada kaitannya dengan belajar atau lingkungan menyatakan bahwa orang kreatif merupakan sarana konsep. .6) Kreativitas umumnya dianggap renanya merupakan bentuk permainan mental. Goldner telah mengatakan bahwa kreativitas merupakan kegiatan otak yang teratur, komprehensif dan imajinatif menuju suatu hasil yang orisinal. 7) Kreativitas adalah bahwa semua orang umumnya terbagi dalam dua kelompok besar : penurut dan pencipta. 8) Kreativitas memandang sebagai kreasi sesuatu yang baru dan orisinil yang kebetulan. Dan masih banyak lagi pengertian kreativitas menurut para ahli, menurut Guilford, memandang kreativitas kemampuan berfikir divergen, yaitu lebih mengarah pada kemampuan memecahkan masalah dengan beberapa kemungkinan alternatif pemecahan, hal ini berlawanan dengan berfikir konvergen yang cenderung menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diambil kesimpulan satu jawaban. Sedangkan menurut James C. Coleman dan Coustance L. Hammen (1974: 452), yang diungkap kembali oleh Jalaludin Rahmad, berfikir kreatif adalah "*Thinking which produces new methods, new concepts, new understanding, new invention, new work of art*" Jadi dari beberapa pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa, kreativitas

adalah kemampuan seseorang untuk meghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan kolerasi baru. Ia harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap.

Berdasarkan pengertian uraian kreativitas yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut di atas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa kreativitas adalah kemampuan mengembangkan suatu gagasan dengan semangat yang tinggi dalam memecahkan masalah melalui beberapa kemungkinan alternatif pemecahannya.

Inovasi

Dalam suatu organisasi pemimpin dalam hal ini adalah Camat dituntut memiliki kemampuan mendisain organisasi menjadi terbuka adalah suatu desain yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan eksternalnya dan merespon lebih cepat dan fleksibel terhadap informasi baru. Dalam informasi terbuka , dimana masyarakat mengambil andil dalam seperangkat norma, nilai, dan prioritas yang dibagikan untuk belajar sinyal untuk berubah, dan respek terhadap inovasi dan pengambilan resiko. Dalam kondisi seperti ini, maka pemimpin diharapkan dapat menyatukan orang-orang dalam organisasi menjadi sebuah masyarakat bertanggungjawab untuk kesuksesan organisasi.

Dengan melakukan seperti ini, maka Camat sebagai permimpin dapat menyebarkan kemampuan individual dan kelompok untuk mengatur kekomplekan dalam lingkungan aparatur birokrasi. Antisipasi seperti ini harus

didesain ke dalam belajar organisasi. Hal tersebut biasanya terjadi dalam pembentukan sebuah proses perencanaan yang efektif dan memotivasi dalam bentuk hadiah bagi orang-orang yang menggunakan itu sebagai mekanisme terhadap pengaturan perubahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald Michael (dalam Warren Bennis, terjemahan oleh Sularno 1995: 201), mengemukakan bahwa perencanaan adalah mode oleh sebiuah keorganisasian social yang komplek bisa mempelajari apa yang dicari untuk mendatang, lekas mengerti bagaimana berusaha melakukan itu, tes untuk menilai apakah kemajuan sudah dibuat, dan dievaluasi kembali sepanjang jalan, apakah keaslian tujuan masih didinginkan. Dalam pengertian secara umum perencanaan tidak lebih daripada proses pembuatan keputusan tentang masa depan dan tindakan mereka. Hal ini dapat dilembagakan dalam organisasi publik mengenai mekanisme perencanaan formal untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi issue baru, merancang dan mempertimbangkan alternatif, melahirkan sebuah consensus tentang tindakan yang berarti, dan memberikan legitimasi terhadap arah perubahan pokok.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin dalam hal ini Camat dapat memberikan setting untuk belajar inovatif dengan desain organisasi terbuka yang mana mengikutsertakan masyarakat atau aparat bekerjasama, memperluas perspektif mereka, mengijinkan untuk mengambil andil, memfasilitasi pengembangan dan penggunaan pendekatan baru. Dengan belajar sebanyak mungkin tentang perubahan lingkungannya, maka orgnaisasi bisa mengembangkan sebuah pengertian dari tujuan, arah dan pernyataan keinginan masa depan.

Berkaitan dengan kondisi pada kantor Kecamatan Palu Barat, dari hasil wawancara dari beberapa informal yaitu; sekretaris Camat (Asrul), Kasubag Umum dan Kepegawaian (Moh. Faadhil), memiliki perspektif yang

sama, yang menilai kemampuan sumber daya aparatur masih rendah, sehingga kemampuan untuk berinovasi sangat minim, dan selanjutnya pendapat dari informan dikuatkan dengan data skunder pegawai pada kantor Kecamatan dimana terdapat 21 pegawai negeri sipil dilingkunga Kantor Kecamatan yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 47,6 %, lebih besar dari sisa yang berpendidikan lainnya, dan selanjutnya terdapat 14 pegawai honorer. Hal ini tentu menimbulkan kendala dalam kaitannya dengan sumber daya aparat yang memiliki keahlian dasar, dan peran pada masing-masing tingakatan kepemimpinan dalam struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan masing-masing pada hierarki jabatan kurang memiliki kemampuan inovasi. Ditambahkan pula oleh informan lain dalam memberikan tanggapan tentang kepemimpinan Camat, terkesan Paternalistik, sering membuat apa yang diucapkan oleh pemimpin juga diikuti oleh bawahannya seperti kata-kata, kita harus proaktif di dalam setiap sambutannya, pada hal tidak ssedikit pejabat berperilaku reaktif yakni mudah marah jika menerima laporan yang kurang menyenangkan, karena tidak bisa menrima kritikan dsbnya, hal itu kadang terjadi pada aparatur Kecamatan dalam rentang kendali dalam birokrasi di kecamatan Palu Barat.

Kenyataan ini menunjukkan kurang memiliki kemampuan konseptual, kemampuan kemanusiaan dan kemampuan teknis, mereka kurang mampu menganalisis dinamika lingkungan kerja dan lingkungan eksternal seperti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan publik, penyusunan agenda dan prioritas program pelayanan berdasarkan kebutuhan adalah tuntutan yang harus di penuhi oleh suatu organisasi publik.

Responsivitas dalam hal ini merupakan salah satu indicator profesionalisme karena

secara langsung responsivitas memberi gambaran secara langsung bagaimana kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan publik secara umum. Tidak terlaksananya misi dan tujuan merupakan kegagalan bagi suatu organisasi.

Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah salah satu organisasi yang dalam tugasnya sebagai pelayanan publik yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik berupa pelayanan prima agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam hal ini yang akan mengurus segala bentuk pelayanan, baik pelayanan administrasi, maupun pelayanan barang dan jasa masyarakat. Untuk itu aparatur birokrasi dituntut harus selalu tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengenai pelayanan prima kepada masyarakat adalah sebagai bentuk program yang pada prinsipnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa dan barang publik

Kenyataan dilapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan; Asrul S.Sos , juga senada yang dikemukakan oleh Kasi Sosial; Hasyim bahwa menunjukkan tidak demikian halnya, dalam menghadapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin majemuk masih menghadapi kendala-kendala. PNS di Kecamatan Palu Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terkesan pilih kasih, terdapat perbedaan perlakuan dan pelayanan antara orang yang dikenal, berpenampilan rapi dan pejabat atau pegawai dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal, penampilan kurang rapi dan masyarakat biasa. Para pegawai Kecamatan Palu Barat kurang berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan kemudian menyerahkan pengambilan keputusan kepada atasannya (Sekcam, Kepala Seksi Sosial), walaupun kadang-kadang persoalan tersebut hanya permasalahan sepele.

Program kegiatan suatu organisasi tentu di harapkan dapat terlaksana sesuai rencana, namun bilamana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan kebijakan organisasi tersebut dalam arti dilaksanakan berdasarkan keinginan secara pribadi, tentunya apa yang menjadi tujuan organisasi tidak dapat terwujud. Kebijakan organisasi ada, dimaksudkan untuk mengarahkan serta mengawasi seluruh aktivitas keorganisasian yang di jalankan oleh personel/pegawai yang berada dalam organisasi tersebut.

Interpretasi

Hasil analisis Profesionalitas aparatur birokrasi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsiya, Diketahui belum optimal. Hal tersubut dapat dilihat dari hasil analisis dari indikator profesionalisme yang terdiri dari; kreativitas, inovasi, dan responsivitas, dikantor tersebut belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pendapat peneliti mengemukakan bahwa professionalitas aparatur birokrasi dapat berlangsung dengan secara baik, apabila sasaran-sasaran program atau kebijakan dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Pemahaman secara menyeluruh hal tersebut, akan memudahkan para individu dalam melakukan komunikasi bagi pencapaian tujuan program kebijakan. Untuk terwujudnya tuntutan profesionalisme aparatur birokrasi, maka diperlukan adanya upaya yang dilakukan oleh institusi atau birokrasi tersebut diperlukan ketepatan pemahaman dan konsistensi dalam mengkomunikasikan sasaran kebijakan serta diperlukan adanya mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat pada level atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik, sehingga bawahan dapat bertindak sesuai dengan harapan atasan. Komunikasi dapat berlangsung dalam organisasi yang dilakukan oleh pemimpin.

Komunikasi ini disebut komunikasi manajerial atau komunikasi organisasional. Hal ini menjadi penting untuk seorang manajer atau pemimpin dalam menyampaikan informasi diseluruh anggota organisasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan aparatur birokrasi yang professional, terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mengorganisir pembagian kerja aparatur dengan menerapkan prinsip spesialisasi, sehingga terbentuk apa yang disebut “the right man on the right place” (menempatkan seseorang pada pekerjaan yang seuai dengan keahliannya) dalam rangka penggunaan efisiensi tenaga kerja

Kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi secara efektif ini sangat dibutuhkan dalam birokrasi Kecamatan Palu Barat, sehingga kebijakan pengelolaan suatu program dipahami secara menyeluruh oleh aparatur birokrasi dan bagi masyarakat khususnya pengguna layanan, seperti: pengurusan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, dan KTP sementara (Domisili) sesuai ketentuan dan kewenangan camat guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat-surat kependudukan. Dalam Visi Kecamatan Palu Barat yaitu “Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang demokratis dan berdaya saing”. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Palu Barat sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu peraturan perundungan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global melayani masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kota Palu yang cerdas, sehat dan sejahtera, dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai professional yaitu; dimana setiap aparatur memiliki kreativitas, inovasi, dan responsivitas terhadap kegiatan atau program, sehingga berjalan lancar. Dengan sendirinya apa yang

diharapkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dapat terwujudkan.

Dalam era desentralisasi sekarang ini, yang merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan demokratis, maka pemimpin diharapkan berprilaku proaktif yang bukan saja berupa seruan di dalam setiap sambutannya pada acara-acara yang sifatnya formal maupun non formal di depan publik, akan tetapi dengan tidak menutup mata melihat, masih banyak pejabat atau pemimpin yang berprilaku reaktif. Mudah marah jika menerima laporan yang kurang menyenangkan, tidak bisa menerima kritikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Profesionalitas aparatur birokrasi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat disimpulkan, bahwa Profesionalitas aparatur birokrasi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan pendekatan teori profesionalitas yang dilihat dari tiga indikator yaitu; Kreativitas, inovasi, dan responsivitas, belum optimal, disebabkan dari ketiga indikator tersebut belum Nampak, baik dilihat dari sisi program melalui renstra Kecamatan, maupun dilihat dari Implementasi program. Terlihat dari beberapa program peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan disebabkan dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kecamatan, kurangnya personil/aparat organik dalam membantu pelaksanaan tugas, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja. Juga respon dari pihak aparatur Kecamatan terhadap pengaduan masyarakat belum berjalan dengan baik. Dilain pihak terdapat isu-isu yang perlu mendapat perhatian, yakni tingginya keinginan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.

Rekomendasi

1. Renstra Kecamatan yang dijabarkan dalam program kerja Kecamatan, perlu prioritas pada program yang berkaitan partisipasi masyarakat, agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
2. Perlu kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDA birokrasi Kecamatan melalui peningkatan pendidikan formal, dan pendidikan latihan.
3. Perlu penambahan dana, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program yang diturunkan dari Visi- Misi Kecamatan Palu Barat.
4. Kurangnya pemberdayaan bawahan: antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pembimbing I Dr. Muzakir Tawil, M.Si, Pembimbing II Dr. Andi Pasinringi, M.Si. yang telah banyak membantu memberikan saran-saran, petunjuk dan waktunya serta kemudahan kepada penulis selama penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo.
- Milles, B. Matthew, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.,
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Solihin, Dadang, 2007. *Indicator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi*. Jakarta: Galia Indonesia.

....., 2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
Singarimbun, Masri Dan Effendi, Sofian.
1995. *Metode Penelitian Survey*. Cet. II.

Jakarta: PT.Pustaka.